

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 04 Oktober 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jumat, 04 Oktober 2019	Maritim RI Harus Sesuai Kondisi Riil	Sebagai Negara maritim terbesar di dunia, Indonesia tidak meniru secara penuh konsep infrastruktur dari Negara mana pun. Alhasil, di perlukan proses adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan ril di Indonesia.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jumat, 04 Oktober 2019	Area sekitar dibangun bertahap	Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PSD) berencana mengembangkan kawasan di sekitar jalan tol Semarang-Demak seluas 600 hektar secara bertahap.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jumat, 04 Oktober 2019	Djuanda Dongkrak Panen	Di tengah musim kering yang masih melanda Jawa, perum Jasa tirta II (PJT II) melakukan beragam langkah guna menjamin pasokan air untuk irigasi lahan pertanian.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	Jumat, 04 Oktober 2019	Jalan Panjang Hadapi Krisis air	Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya merilis 15 kecamatan di DKI Jakarta yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau panjang tahun ini.
5	kompas (Halaman 13)	Jumat, 04 Oktober 2019	Kelola Arus Urbanisasi	Selama kurun 1996-2016, menurut Bank Dunia, setiap 1 persen peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia hanya mampu meningkatkan produk domestic bruto atau PDB perkapita 1,4 persen. Sementara, Asia Timur dan pasifik, 1 persen urbanisasi bisa meningkatkan PDB per kapita 2,7 persen.
6	Media Indonesia (Halaman 13)	Jumat, 04 Oktober 2019	Urbanisasi belum Dikelola dengan Baik	Pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Akibatnya, manfaat positif dari urbanisasi belum maksimal di rasakan Indonesia..
7	Kompas (Halaman 15)	Jumat, 04 Oktober 2019	Kaldera Toba jadi Anggota Bumi Global	Kalender Toba akhirnya anggota taman bumi Global UNESCO. pembangunan kawasan harus berbaris konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
8	Media Indonesia (Halaman 16)	Jumat, 04 Oktober 2019	Taman Nasional Komodo Dikelola berbasis ekosisten	Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di taman nasional komodo bukan penyebab menurunnya populasi komodo.
9	Kompas (Halaman 17)	Jumat, 04 Oktober 2019	Tanggul Pesisir Demi perbaikan kawasan	Pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara tak sekedar untuk mengantisipasi ancaman banjir rob. Pembangunan itu juga untuk memperbaiki daya dukung lingkungan Jakarta yang sudah krisis.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Jumat, 04 Oktober 2019	Arsitek Harus Tawarkan Konsep Inovatif	Arsitek di Tanah Air diharapkan mampu menawarkan desain yang kreatif dan inovatif untuk pembangunan kawasan ibu kota Negara (IKN) baru dalam sayembara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Judul	Maritim RI Harus Sesuai Kondisi Riil	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Sebagai Negara maritim terbesar di dunia, Indonesia tidak meniru secara penuh konsep infrastruktur dari Negara mana pun. Alhasil, di perlukan proses adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan ril di Indonesia.		

► KONSEP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Maritim RI Harus Sesuai Kondisi Riil

Bisnis, JAKARTA — Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa meniru secara penuh konsep infrastruktur dari negara manapun. Alhasil, diperlukan proses adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan riil di Indonesia.

Aprianus Dani Tolok
redaksi@bisnis.com

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamiluddin mengatakan segala upaya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, jika belum maksimal, hal itu adalah fakta yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Dia mencontohkan kawasan Indonesia timur masih memiliki banyak masalah karena infrastruktur kemaritiman yang belum terbangun dengan maksimal.

"Kita melihat pertanya peningkatan infrastruktur kemaritiman yang menyangkut kepelabuhanan, tidak hanya yang besar, tetapi juga yang

► Terdapat empat masalah terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu penyiapan proyek, pengadaan tanah, pembiayaan, dan perizinan.

sesuai dengan kebutuhan setempat. [Pelabuhan] besar memang bagus tetapi kalau tidak maksimal [pe-manfaatannya] jadi tidak efisien," ujarnya, Rabu (2/10).

Kemudian, lanjutnya, Indonesia juga membutuhkan peningkatan di sektor industri maritim. Maksudnya, kapal-kapal yang ada juga harus sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang terhubung ke sentra-sentra perekonomian, termasuk destinasi-destinasi wisata prioritas.

"Salah satu tantangan dalam membangun kawasan prioritas wisata adalah memperkuat infrastruktur konektivitas," ujarnya.

Sebagai solusi, Kemenko Maritim dan lembaga-

lembaga terkait pun terus mendorong rancangan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Rakyat.

Perpres Pelayanan Rakyat ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dari infrastruktur konektivitas yang menghubungkan kegiatan ekonomi besar hingga yang kecil. Selain itu, pembangunan di kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) juga diharapkan terus digenot.

4 MASALAH

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) Wahyu Utomo menambahkan bahwa terdapat empat masalah terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia. Empat masalah tersebut adalah penyiapan proyek, pengadaan tanah, pembiayaan, dan perizinan.

"Kami [KPPPIP] terus berusaha menyelesaikan semua masalah dengan menyusun langkah yang tepat dan semoga bisa menjadi solusi," katanya.

Namun, dia berharap sinergitas terus terjalin di antara lembaga atau kementerian terkait, sehingga memperkuat KPPPIP dalam membangun infrastruktur yang tepat guna atau sesuai dengan kebutuhan.

Direktur Transportasi Bappenas Ikhwan Hakim mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seringkali menemui kendala dari sisi supervisi. Standardisasi dokumen rangkaian proses yakni mulai dari perencanaan, alokasi dana, hingga proses konstruksi, dinilai menjadi solusi.

"Yang menjadi kunci adalah ba-

gaimana kita menjamin dari proses pengusulan, appraisal, kemudian sampai ke evaluasi itu menggunakan dokumen yang terstandarisasi, ujarnya, Rabu (2/10).

Selain itu, lanjutnya, rangkaian proses perencanaan hingga pembangunan infrastruktur diatur dalam regulasi tertentu guna memastikan semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan atau standar yang disepakati.

Harapannya, keberadaan infrastruktur yang tepat guna dapat menjadi pemantik transformasi atau pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang dicanangkan.

Salah satu contoh standarisasi dokumen dalam rangkaian proses pembangunan infrastruktur adalah digitalisasi sertifikat tanah usai dibebaskan, yang merupakan sinergi antara Kementerian ATR/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sertifikasi lahan usai dibebaskan menjadi langkah pengamanan aset negara.

"Koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN perlu terus ditingkatkan, di samping dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum juga dalam sertifikasi tanah negara sebagai langkah pengamanan aset milik negara," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kementerian PUPR akan

melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang konstruksi secara masif. Sertifikasi para pekerja konstruksi menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan ke depannya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan peningkatan kualitas SDM yang ada dengan melakukan berbagai upaya perlu dilakukan.

"Infinya dengan mengupayakan berbagai metode yang bisa diterapkan pada para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR yang sangat super sibuk, karena mendapat beban tugas yang luar biasa," ujarnya.

Tantangan yang dihadapi BPSDM dalam mencapai Visium 2030, adalah kondisi yang dari total 23.000 jumlah SDM, hanya 40% yang memiliki latar belakang keahlian di bidang *core techno business process* Kementerian PUPR, yakni bidang sumber daya air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyedia Perumahan.

Menurutnya, target grup pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM di antaranya adalah Eselon III Pejabat Struktural Administrator dan Eselon IV Pejabat Pengawas di BPIW. Tujuannya adalah agar mereka mampu melakukan analisis dalam proses penentuan pemilihan program pengembangan infrastruktur wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, BPSDM, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (JP3IW) membantu Aparatur Sipil

Negara (ASN BPIW), menyelenggarakan pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. □



Judul	Area sekitar dibangun bertahap	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD) berencana mengembangkan kawasan di sekitar jalan tol Semarang-Demak seluas 600 hektar secara bertahap.		

► TOL SEMARANG–DEMAK

Area Sekitar Dibangun Bertahap

Bisnis, JAKARTA — PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD) berencana mengembangkan kawasan di sekitar jalan tol Semarang–Demak seluas 600 hektare secara bertahap. Pengembangan kawasan menjadi nilai tambah bagi proyek jalan tol yang juga terpadu dengan pembangunan tanggul laut.

Direktur Utama PPSD Handoko Yudianto mengatakan area untuk pengembangan kawasan di sekitar tol Semarang–Demak tidak terlampau luas karena keterbatasan lahan di daerah tersebut. Kendati demikian, peluang pengembangan kawasan tetap dibidik karena memberikan nilai tambah bagi proyek jalan tol. “Kawasan ini membuat proyeknya layak investasi. Nanti kami investasi sendiri, bukan PU [Kementerian PUPR] yang membebaskan lahannya,” jelasnya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Dia menuturkan, pembebasan lahan untuk kawasan akan dilakukan secara bertahap dengan pembebasan lahan untuk proyek jalan tol. Untuk diketahui, pembebasan lahan untuk proyek jalan tol menjadi kewenangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, badan usaha jalan tol bisa berpartisipasi lewat skema talangan.

Handoko menuturkan, proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol telah mencapai 40% dan hingga akhir tahun diharapkan tercapai 70%. Persentase tersebut merupakan kebutuhan lahan untuk segmen yang digarap PPSD sepanjang 16,3 kilometer. Adapun panjang keseluruhan jalan tol yang akan dibangun mencapai 27 kilometer.

Menurut Handoko, tahap konstruksi bisa dilakukan jika lahan yang sudah dibebaskan pemerintah diserahkan kepada perseroan. Dia menyebut, dari lahan yang sudah dibebaskan, tahap konstruksi akan dimulai dari sisi Demak. Pekerjaan konstruksi pada proyek ini dijadwalkan rampung dalam dua tahun. “Kami menunggu penyerahan lahan dulu baru mulai konstruksi. Saat ini [pembebasan lahan] sudah 40% dan akhir tahun diharapkan 70%. Kami mulai dari sisi Demak dulu,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, PPSD menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). (Rivki Maulana)

Judul	Djuanda Dongkrak Panen	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Di tengah musim kering yang masih melanda Jawa, perum Jasa tirta II (PJT II) melakukan beragam langkah guna menjamin pasokan air untuk irigasi lahan pertanian.		

► BENDUNGAN IRIGASI

Djuanda Dongkrak Panen

Bisnis, JAKARTA — Di tengah musim kering yang masih melanda Jawa, Perum Jasa Tirta II (PJT II) melakukan beragam langkah guna menjamin pasokan air untuk irigasi lahan pertanian. Pengelolaan sumber daya air menjadi krusial karena Bendungan Djuanda atau Jatiluhur yang dikelola PJT II menjadi sumber irigasi bagi 240.00 hektare lahan di Jawa Barat.

Direktur Utama PJT II, U. Saefudin Noer mengatakan pihaknya sudah melakukan pembersihan sungai, bendung, dan bendungan guna memperlancar aliran air dari bendungan ke saluran irigasi. PJT II juga membuat jadwal pembagian air ke beberapa kawasan pertanian yang menjadi wilayah pelayanan perusahaan.

Saefudin menuturkan, PJT II juga melakukan edukasi dan

sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk para petani agar bisa beradaptasi dengan kondisi musim kemarau panjang. Hasilnya, pada pekan lalu para petani di Blok KW 8, Tunggak Jati, Karawang merayakan panen.

“Dengan gotong royong berbagai pihak, pertanian di wilayah operasi dan layanan Jasa Tirta II dapat panen di tengah musim kemarau yang panjang,” ujar Saefudin kepada *Bisnis*, Kamis (3/10).

Luas lahan pertanian di Karawang yang dipanen pada pekan lalu mencapai 484 hektare. Lahan tersebut mendapat pasokan air dari Saluran Induk Tarum Utara. Saluran tersebut merupakan bagian dari Daerah Irigasi Tarum Utara dengan total area lebih dari 45.000 hektare. *(Rivki Maulana)*

Judul	Jalan Panjang Hadapi Krisis air	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sebelumnya merilis 15 kecamatan di DKI Jakarta yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau panjang tahun ini.		

► INFRASTRUKTUR IBU KOTA

Jalan Panjang Hadapi Krisis Air

Bisnis, JAKARTA — Sudah jatuh tertimpa tangga, barangkali sanggup menggambarkan bencana kekeringan, di kala Ibu Kota masih berusaha memenuhi kebutuhan air bersih untuk warganya.

Aziz Rahardyan
redaks@bisnis.com

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya merilis 15 kecamatan di DKI Jakarta yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau panjang tahun ini.

Di antaranya, Kecamatan Menteng, Gambir, Kemayoran, Tanah Abang, Makassar, Pulogadung, Cipayung, Tebet, Pasar Minggu, Setiabudi, Cilandak, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan Penjarangan, akibat tak tercurah hujan selama lebih dari 60 hari.

Nahas, beberapa di antara daerah tersebut, memang belum tersentuh pelayanan air bersih dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PAM Jaya.

Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo membenarkan bahwa hingga kini cakupan wilayah pelayanan air bersih di Ibu Kota masih berada di angka 63,4%. Namun, Bambang menjamin bahwa pihaknya berkomitmen kuat merealisasikan rencana jangka panjang peningkatan cakupan pelayanan air bersih.

"Kita akan ada tambahan suplai pasokan air. Di skala nasional, yaitu sistem penyediaan air minum [SPAM] Jatiluhur 1, direncanakan 4.000 liter per detik. Selanjutnya SPAM Karian

► Hingga kini cakupan wilayah pelayanan air bersih di Ibu Kota masih berada di angka 63,4%.

itu 3.200 liter per detik. Kemudian, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air [IPA] Buaran itu 3.000 liter per detik," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (3/10).

Dalam proyek SPAM dari Bendungan Jatiluhur senilai Rp4 triliun yang disebut sebagai proyek berkapasitas produksi air terbesar di Indonesia ini, PAM Jaya akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Perusahaan Daerah Air Minum lain dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Adapun, SPAM Karian merupakan proyek regional, dengan sumber air baku dari Waduk Karian yang total investasinya mencapai Rp6 triliun.

"Di samping itu kita juga harus memikirkan tingkat kehilangan air, atau *Non-Revenue Water* [NRW]. Kita akan berusaha terus memperkecilnya," tambah Bambang.

Data PAM Jaya memaparkan bahwa tingkat NRW atau selisih air yang tidak berekening pada 2019 masih mencapai 42%. Baik kehilangan air fisik akibat kebocoran dan luapan, atau kehilangan air komersial akibat konsumsi air ilegal dan ketidakakuratan meteran.

PAM Jaya menargetkan persentase NRW akan berkurang menjadi 36% pada 2023. Setelah itu, target 26% pada 2030 akan diusahakan pula, bersamaan dengan proyeksi cakupan wilayah pelayanan PAM Jaya yang telah mencapai 100%.

Bambang menjelaskan bahwa



Rincian Pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) di APBD 2020 oleh PAM Jaya

A. Peningkatan cakupan pelayanan melalui pembangunan SPAM dan pengembangan jaringan pipa (Rp746,7 miliar)

- Pembangunan SPAM Pesanggrahan Tahap II (Rp195 miliar)
- Reinforcement & Extension jaringan transmisi dan distribusi (Rp275 miliar)
- Pembangunan SPAM Cililung/Pejaten (Rp250 miliar)
- Supply ke area Pegadungan-BP & Reservoir Cikokol (Rp26,7 miliar)

B. Ketahanan Pelayanan Air Bersih (Rp310 miliar)

- Relokasi pipa akibat proyek pemerintah (Rp30 miliar)
- Relokasi SPAM Cilandak (Rp280 miliar)

C. Pelayanan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rp15 miliar)

D. Penerapan Suplai Air Curah SPAM Jatiluhur Tahap 1 (Rp700 miliar)

- Pipa Transmisi total investasi ± Rp4 triliun (Dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas SDA)
- Pipa Distribusi total investasi ± Rp5,2 triliun (Rp700 miliar dari Rp1,6 triliun yang akan diusulkan lagi di APBD-P 2020)
- Penurunan *Non-Revenue Water*/NRW total investasi ± Rp3 triliun (Rp0 dari Rp700 miliar yang akan diusulkan lagi di APBD-P 2020)

Total Rp1,7 triliun

Sumber: PAM Jaya

upaya-upaya ini akan dimulai pada 2020. Pihaknya pun telah mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) mencapai Rp1,7 triliun dalam APBD 2020 pemerintah provinsi DKI Jakarta demi merealisasikan rencana ini.

KEKERINGAN

Di samping rencana jangka panjang, Bambang mengungkap bah-

wa pihaknya bersama Tim Satgas Air Bersih yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membantu warga yang mengalami kelangkaan air bersih.

"Satgas ini dibentuk untuk mengatasi kekeringan. Jadi bagi warga Jakarta yang mengalami krisis air bersih, sementara kita pasok dengan toren air dan tangki truk, kemudian

masyarakat mengambil dari situ. Sistemnya sekarang pakai [call center] 112 dan laporan dari RT/RW," ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan, setiap hari pihaknya telah mengirimkan air ke wilayah Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, yang telah mulai kesulitan air bersih.

"Kita juga punya kios-kios air eksisting, yang baik kemarau atau penghujan pun tetap kita kirim air," tambahnya.

Sebelumnya, Anies membentuk Satgas Air Bersih Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan 1.162 personel gabungan dari berbagai instansi, baik unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PAM JAYA dan sejumlah mitra dari Lurah, PPSU, hingga unsur Perwakilan RT/RW.

"Pasokan airnya disiapkan dari PAM Jaya. Lalu kita siapkan dengan semua cara yang ada. Ada yang menggunakan tangki, ada yang menyiapkan di sana tempat penyimpanan sementara, tapi intinya adalah tidak boleh ada lingkungan di Jakarta yang kekurangan air bersih," ungkap Anies beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo akan terus mensosialisasikan tim tersebut agar penanganan krisis air bisa dilakukan secepat mungkin.

Subejo mengimbau warga yang kesulitan air bersih segera menghubungi 112, RT/RW, kelurahan, atau menyampaikan keluhan lewat laman pengaduan atau media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta. ■

Judul	Kelola Arus Urbanisasi	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	kompas (Halaman 13)		
Resume	Selama kurun 1996-2016, menurut Bank Dunia, setiap 1 persen peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia hanya mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB perkapita 1,4 persen. Sementara, Asia Timur dan pasifik, 1 persen urbanisasi bisa meningkatkan PDB per kapita 2,7 persen.		

Kelola Arus Urbanisasi

Indonesia masih tertinggal dalam mengelola urbanisasi dan belum mendapat manfaat darinya. Padahal, urbanisasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS — Selama kurun 1996-2016, menurut Bank Dunia, setiap 1 persen peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia hanya mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB per kapita 1,4 persen. Sementara, di Asia Timur dan Pasifik, 1 persen urbanisasi bisa meningkatkan PDB per kapita 2,7 persen.

Saat ini, sekitar 151 juta penduduk Indonesia atau sekitar 56 persen dari total penduduk tinggal di perkotaan. Pada 2045, penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 220 juta jiwa.

"Ketimpangan kesejahteraan juga tergolong masih besar antara kawasan perkotaan dan perdesaan karena penduduk yang tetap tinggal di perdesaan cenderung belum mendapatkan manfaat urbanisasi," kata Samah Wahba, Global Director for Urban and Territorial Development Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia, di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Bank Dunia dalam laporan bertajuk "Waktunya ACT untuk Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia" menyebutkan, ada tiga prinsip dasar kebijakan yang disarankan untuk melipatgandakan manfaat urbanisasi, yaitu ACT. ACT meliputi pemerataan akses ke pelayanan dasar berkualitas tinggi di semua wilayah; peningkatan konektivitas antarwilayah dan an-

tara masyarakat dan lapangan kerja, kesempatan, dan pelayanan; serta target untuk mengatasi kesenjangan antar-daerah dan antarkelompok masyarakat.

Ekonom senior Bank Dunia Mark Roberts menyatakan, apabila dikelola lebih baik, urbanisasi dapat memperluas kesempatan untuk semua masyarakat, baik di kota maupun di desa. Sebaliknya, urbanisasi dapat memperparah kesenjangan kesempatan dari generasi ke generasi.

Periode 25 tahun ke depan menjadi masa penentuan bagi Indonesia untuk memenuhi janji urbanisasi, yaitu perkotaan yang sejahtera, inklusif, dan layak huni. Inklusivitas urbanisasi bergantung pada konektivitas antarwilayah.

Kebijakan inklusif

Laporan Bank Dunia secara tersirat menyoroiti urbanisasi Indonesia yang terfokus di Jakarta. Pemerintah mesti membidik daerah-daerah tertinggal dan kelompok marjinal melalui kebijakan ekonomi yang inklusif. Perencanaan urbanisasi penting karena sekitar 70 persen penduduk diperkirakan tinggal di perkotaan pada 2045.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan urbanisasi. Dalam APBN, perlu-

asan cakupan kualitas pelayanan dasar dialokasikan dalam anggaran pendidikan, kesehatan, program perlindungan sosial, serta subsidi energi dan non-energi.

Terkait konektivitas wilayah, perencanaan urbanisasi didukung peningkatan anggaran infrastruktur dan transfer dana ke pusat dan daerah (TKDD). Pada 2020, misalnya, anggaran infrastruktur Rp 423,3 triliun, sementara TKDD Rp 856,9 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk asuransi bencana dan aset negara.

Menurut Sri Mulyani, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi kebijakan pemerintah paling strategis untuk pemerataan ekonomi. Urbanisasi yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa akan dialihkan ke bagian timur Indonesia.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, daya dukung ibu kota baru pada tahap awal didesain untuk 1,5 juta penduduk di kawasan 40000 hektar. Selanjutnya, wilayah akan diperluas dengan daya dukung yang meningkat hingga dua kali lipat. "Pertumbuhan dikendalikan agar tidak melebar," ujarnya.

Pengendalian kota dilakukan lewat sistem zonasi, kegiatan dibatasi hanya untuk pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan riset. (KRN/LKT)

Masalah dan Peluang Urbanisasi



Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis Kemiskinan (Persen)



Sumber: Laporan Bank Dunia "Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia 2019"



INFOGRAFIK: TIJUMA

Judul	Urbanisasi belum Dikelola dengan Baik	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 13)		
Resume	Pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Akibatnya, manfaat positif dari urbanisasi belum maksimal di rasakan Indonesia..		

Urbanisasi belum Dikelola dengan Baik

Pada 2045 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 220 juta jiwa.

M ILHAM RAMADHAN
 ilham@mediaindonesia.com

PENGLOLAAN urbanisasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Akibatnya, manfaat positif dari urbanisasi belum maksimal dirasakan Indonesia.

Global Director for Urban and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia, Sameh Wahba, mengatakan urbanisasi dapat membawa manfaat bagi suatu negara bila pengelolaan dilakukan dengan baik.

Urbanisasi yang dikelola dengan baik sejalan dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Suatu negara akan mendapatkan pendapatan yang tinggi apabila kotanya mampu bergeliat.

"Urbanisasi terasosiasi dengan 1% penurunan masyarakat miskin. Urbanisasi yang dikelola dengan baik akan memainkan peran penting dalam mengentaskan warga dari kemiskinan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Bila laju urbanisasi tidak dapat dikelola dengan baik, yang ada justru timbulnya daerah kumuh, kemacetan, polusi, dan buruknya pelayanan publik.

Bank Dunia, kata Wahbe, belum melihat ada manfaat yang besar dirasakan Indonesia dari urbanisasi. Urbanisasi penduduk Indonesia setiap 1% hanya mampu menaikkan 1,4% PDB per kapita.

Angka itu lebih rendah daripada negara Asia Timur dan Pasifik lainnya yang mampu mendongkrak 2,7% PDB per kapita.

Menurutnya, bila Indonesia tidak segera melakukan pengelolaan urbanisasi yang baik, akan menambah beban kepada pemerintah daerah hingga pusat.

"Urbanisasi yang dikelola dengan baik akan memainkan peran penting dalam mengentaskan warga dari kemiskinan."

Sameh Wahba
 Global Director for Urban and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia

Bank Dunia merekomendasikan tiga prinsip kebijakan yang dapat digunakan Indonesia untuk mencegah dampak negatif dari urbanisasi yang seharusnya dapat menanggulangi kemiskinan itu.

Tiga prinsip kebijakan itu ialah *augment*, *connect*, and *target* (ACT). *Augment* berarti pemerintah harus menambah dan meningkat-

kan mutu layanan dasar serta infrastruktur untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan peluang setara, dan mengurangi ketimpangan modal manusia.

Pada poin *connect*, pemerintah diminta untuk mampu menghubungkan orang dengan pekerjaan dan layanan dasar di dalam kota dengan kawasan perkotaan dan perdesaan sekitarnya dengan pasar internasional.

Adapun pada *target*, pemerintah harus mampu menarget tempat tinggal dan orang yang tertinggal dalam proses urbanisasi agar manfaat kemakmuran urbanisasi dapat dirasakan dan perkotaan yang layak huni harus menjadi pertimbangan utama.

Saat ini penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 151 juta jiwa atau setara 56% total penduduk Indonesia. Jumlah itu pada 2045 akan meningkat menjadi 220 juta jiwa.

Optimistis mengejar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia. Dirinya optimis urbanisasi di Indonesia berdampak ke PDB yang lebih besar. Salah satunya dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemerintah juga akan mengembangkan teknologi digital dalam pengelolaan perencanaan perkotaan.

Dengan efisiensi tersebut, diharapkan mampu memberi dampak yang signifikan kepada masyarakat dan memengaruhi penerimaan negara. (E-1)

Judul	Kaldera Toba jadi Anggota Bumi Global	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Kalender Toba akhirnya anggota taman bumi Global UNESCO.pembangunan kawasan harus berbaris konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.		

Kaldera Toba Jadi Anggota Taman Bumi Global

Kaldera Toba akhirnya menjadi anggota Taman Bumi Global UNESCO. Pembangunan kawasan harus berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

MEDAN, KOMPAS — Kaldera Toba diterima menjadi anggota Taman Bumi Global UNESCO. Hal ini diumumkan di laman resmi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB tersebut. Keanggotaan ini mendorong pembangunan pariwisata di Toba mengedepankan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, selain menjadi media promosi pariwisata Danau Toba di dunia.

Hal itu dikemukakan Wakil General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Gagarin Sembiring, Kamis (3/10/2019). Pada laman en.unesco.org disebutkan, "Sebagai hasil dari pemeriksaan menyeluruh, di hadapan pengamat dan perwakilan beberapa negara anggota, Dewan Taman Bumi Global UNESCO mengusulkan untuk meneruskan nominasi 15 Taman Bumi Global UNESCO baru untuk disahkan Dewan Eksekutif UNESCO pada 2020." Kaldera Toba masuk dalam daftar tersebut.

Menurut Gagarin, Kaldera Toba menjadi anggota Taman Bumi Global UNESCO (UGG) kelima di Indonesia. Sertifikat resmi akan diterima pada April 2020 di Paris, Perancis.

Empat anggota UGG lain adalah Taman Bumi Kaldera Batur, Taman Bumi Gunung Sewu, Taman Bumi Ciletuh-Palabuhanratu, dan Taman Bumi Rinjani.

Di seluruh dunia ada 161 taman bumi anggota UGG yang tersebar di 44 negara. Kaldera Toba pernah diajukan menjadi anggota UGG pada 2015 dan 2018, tetapi belum diterima. Toba diminta melakukan pembenahan agar sesuai dengan prinsip taman bumi.

Tiga pilar pembangunan

Gagarin mengatakan, dengan diterima menjadi anggota UGG, pembangunan kawasan Danau Toba harus berbasis taman bumi dengan tiga pilar utama, yakni konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan ini memadukan unsur geologi, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan.

Kaldera Toba, lanjut Gagarin, berpotensi menjadi pusat pariwisata dan ilmu pengetahuan geologi karena pernah mengubah dunia lewat letusan dahsyat pada 74.000 tahun lalu. Bukti-bukti letusan dahsyat itu tersimpan dalam bebatuan di bentang alam Kaldera Toba saat ini.

"Pulau Samosir awalnya merupakan dasar danau yang terangkat menjadi pulau akibat dorongan dapur magma Kaldera Toba. Di pulau itu terdapat bukti lapisan sedimentasi danau dan endapan ganggang," tuturnya.

Pembangunan pariwisata di Danau Toba akan melibatkan masyarakat lokal, tidak hanya berbasis modal. "Masyarakat diedukasi untuk membuat *homestay*, suvenir, rumah makan, pertunjukan kebudayaan, dan pertanian," ujar Gagarin.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Ria Nofida Telaumbanua mengatakan, keanggotaan UGG akan membuat kawasan Danau Toba semakin dikenal. Pemerintah akan melakukan pembinaan kelompok sadar wisata untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Kepala Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Sigulatti Wilmar Simanjanorng menyatakan, rekomendasi UNESCO, seperti pengadaan pusat informasi, penyediaan air bersih, toilet bersih, papan informasi, toko suvenir, konservasi lingkungan, dan sosialisasi rencana induk, harus diterapkan dalam pembangunan Kaldera Toba. (NSA)

Judul	Taman Nasional Komodo Dikelola berbasis ekosisten	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 16)		
Resume	Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di taman nasional komodo bukan penyebab menurunnya populasi komodo.		

Taman Nasional Komodo Dikelola Berbasis Ekosistem

Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di Taman Nasional Komodo bukan penyebab menurunnya populasi komodo.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

BERBASIS ekosistem atau *ecosystem base management*, begitulah Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dikelola nantinya. Penataan ulang salah satu tujuh keajaiban dunia itu akan diintegrasikan dengan destinasi unggulan Labuan Bajo.

"Masyarakat Desa Komodo merupakan salah satu unsur dari ekosistem Pulau Komodo sehingga pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi di Jakarta, kemarin.

Di taman nasional itu, tercatat

ada tiga desa yang didiami lebih dari 4 ribu jiwa. Satu desa terletak di Pulau Komodo dengan jumlah penduduk 1.818 jiwa, yang termasuk dalam zona khusus permukiman seluas 17,6 hektare sejak 24 Februari 2012.

Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, ekspedisi Douglas Burden mencatat adanya permukiman di Pulau Komodo yang dihuni 40 keluarga, pada 1926.

Djati mengatakan, sebagai tujuan wisata alam premium, perlu dibangun penyediaan sarana-prasarana dan jasa wisata alam yang mempunyai kualitas berstandar internasional, termasuk sebuah museum.

Oleh sebab itu, pengelolaan Taman Nasional Komodo harus terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata Labuan

Bajo. "Saat ini sedang disusun ITMP (*integrated tourism master plan*) Labuan Bajo-Flores yang akan diselesaikan di 2020," terang Djati.

Penegasan ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat setempat setelah mencuatnya wacana penutupan dan relokasi penduduk di Pulau Komodo, beberapa waktu lalu. Kondisi itu mendorong Menteri LHK Siti Nurbaya membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian.

Tim terpadu menyimpulkan Pulau Komodo tidak perlu ditutup karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar penutupan baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Penutupan Pulau Komodo akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha wisata. Dari hasil *monitoring* populasi Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program (KSP), populasi komodo selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan tren yang relatif stabil antara 2.400-3.000 ekor.

Tiket Rp14 juta

Seusai rakor menteri dan Gubernur NTT di Jakarta, Senin (30/9), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Pulau Komodo akan menjadi destinasi wisata eksklusif dengan harga tiket masuk yang mencapai US\$1.000 atau Rp14 juta per orang dalam bentuk *membership* tahunan.

Pengenaan harga tiket masuk yang mahal itu juga ialah gagasan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Kami tidak menghendaki Pulau Komodo nanti mengarah kepada *mass tourism*, yakni wisatawan datang berbondong-bondong masuk ke Pulau Komodo tanpa memperhatikan lingkungan di Pulau Komodo sehingga terjadi perburuan liar dan kerusakan lingkungan. Kami inginkan komodo menjadi liar sehingga kawasan itu seperti aslinya," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Jelamu seperti dikutip dari *Antara*. (JL/H-2)

Judul	Tanggul Pesisir Demi perbaikan kawasan	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 17)		
Resume	Pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara tak sekedar untuk mengantisipasi ancaman banjir rob. Pembangunan itu juga untuk memperbaiki daya dukung lingkungan Jakarta yang sudah krisis.		

Tanggul Pesisir demi Perbaikan Kawasan

Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara tak sekedar untuk mengantisipasi ancaman banjir rob. Pembangunan itu juga untuk memperbaiki daya dukung lingkungan Jakarta yang sudah kritis.

JAKARTA, KOMPAS — Proyek NCICD atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara tidak hanya untuk pengendalian banjir, tetapi juga lebih pada *environmental remediation* atau perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan. Demikian diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima *Kompas* di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara mencakup pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta yang sudah dimulai sejak 2014. Pada 2014, Kementerian PUPR membangun tanggul tahap I di Pluit sepanjang 75 meter.

Adapun pada 2016-2018 dilanjutkan pembangunan tahap II sepanjang 4,5 kilometer yang terdiri atas dua paket. Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, dengan panjang 2,3 kilometer dan paket II di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, dengan panjang tanggul 2,2

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali menambahkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta sampai saat ini masih dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait dengan kemungkinan pelibatan swasta, dia mengatakan, masih terkendala oleh aturan. "Masih dikaji (aturan pelibatan swasta). Konsepnya tetap akan menggandeng swasta, terutama yang mendapat keuntungan dari pembangunan tanggul pantai," katanya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari hasil penghitungan lapangan, panjang tanggul darurat yang harus dibangun sepanjang 29,058 kilometer. Sejauh ini, tanggul yang sudah dibangun memiliki panjang 8,225 kilometer.

Achmad menambahkan, Kementerian PUPR sudah merencanakan pembangunan tanggul pada tahun-tahun berikutnya menggunakan anggaran tahun jamak. Pada 2020-2024 direncanakan ada penambahan pembangunan tanggul sepanjang

770 meter di Kali Baru dan Kamal Muara sepanjang 813 meter.

"Kami sudah berkoordinasi dengan DKI untuk pembagian tanggung jawab pembangunan karena swasta belum masuk," ujar Achmad.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menjelaskan, tanggul yang sudah dibangun itu merupakan tanggul tipe A yang berfungsi mengantisipasi banjir rob. Tanggul tipe A memiliki dua jenis, yaitu tanggul pantai dan tanggul sungai.

"Untuk tanggul sungai, khususnya sungai yang kewenangannya ada di Kementerian PUPR, menjadi tanggung jawab pusat. Kalau tanggul pantai, itu menjadi tanggung jawab bersama antara pusat, provinsi, dan pengembang yang punya properti di pantai," kata Firdaus.

Dirasakan masyarakat

Pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta Utara mulai dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat pesisir. Sebagian daerah pesisir tersebut, terutama di Muara Baru dan

Kali Baru, kini terbebas dari banjir rob.

Emi (35), salah satu warga RW 017, Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, mengatakan, tempat tinggalnya sudah bebas dari banjir rob sejak 2017. Hal itu tidak terlepas dari pembangunan tanggul pantai yang dibangun di tempat tersebut.

"Dulu belum ada tanggul, setiap bulan kalau air laut pasang, di sini terendam air laut. Tinggi airnya itu bisa sampai 2 meter," katanya.

Pengakuan serupa disampaikan Syafrin (70), warga RW 003, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Clincing. Dia mengatakan, meski air laut tidak sampai merendam perumahan warga, permukiman di sekitar pantai kumuh lantaran sampah laut yang diempaskan ombak ke pantai.

"Di sini dulu penuh sampah karena sampah dari laut, kan, sebagian dibawa ombak ke sini, tetapi sekarang sudah bersih sejak ada tanggul. Tempat ini tiap sore dipakai warga untuk senam dan tempat bermain anak-anak," katanya.

(VAN/DAN)

Judul	Arsitek Harus Tawarkan Konsep Inovatif	Tanggal	Jumat, 04 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Arsitek di Tanah Air diharapkan mampu menawarkan desain yang kreatif dan inovatif untuk pembangunan kawasan ibu kota Negara (IKN) baru dalam sayembara yang diselenggarakan oleh pemerintah.		

► LOMBA DESAIN IBU KOTA BARU

Arsitek Harus Tawarkan Konsep Inovatif

Bisnis, JAKARTA — Arsitek di Tanah Air diharapkan mampu menawarkan desain yang kreatif dan inovatif untuk pembangunan kawasan ibu kota negara (IKN) baru dalam sayembara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ariko Andikabina mengatakan minat arsitek lokal untuk terlibat dalam sayembara desain kawasan IKN cukup tinggi.

Menurutnya, sayembara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut merupakan salah satu cara terbaik untuk mengadu ide dan gagasan terkait konsep desain IKN.

"IKN harus menjadi media untuk menunjukkan kualitas arsitek Indonesia kepada dunia," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (3/10).

Dia berharap ajang kompetisi tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh arsitek Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kemampuannya. Pasalnya, ajang kompetisi itu tidak hanya bisa diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga oleh non-WNI.

Terkait konsep yang diajukan oleh para arsitek, dia menilai konsep tersebut haruslah yang bisa menjawab tantangan masa depan.

"Kota masa depan sudah tidak sama dengan kota kita hari ini. Perkembangan teknologi, hingga perubahan gaya hidup itu menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab dalam

pembangunan IKN," ujarnya.

Meski pemerintah telah memastikan bahwa pembangunan IKN mengusung tema Forest City atau Kota di dalam hutan, Ariko menilai unsur kecanggihan teknologi juga penting.

Dia menggambarkan konsep masa depan yang dimaksud misalnya sistem pengantaran paket, pos, surat sudah bisa dilakukan dengan menggunakan drone. Kemudian, mobilisasi tidak lagi terpaku pada kendaraan pribadi, dan bahan bakar sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) tetapi menggunakan energi listrik.

"Pesan saya adalah agar tercurah gagasan-gagasan yang cemerlang dari arsitek Indonesia dalam desain kawasan IKN," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sebagai juri, pihaknya akan berpatokan bahwa desain kota baru harus menjadi kota terbaik sedunia. Maka semua konsep-konsep terbaik sedunia harus ada di kota baru tersebut.

"Karena ini dibuat dari nol kan maka misal konteks sejarah, kota dunia itu kota harus humanis, jaraknya dekat orang jalan kaki mengurangi mobil motor, bangunan go green, ramah lingkungan tidak seperti perkotaan sekarang," katanya di Bandung, Kamis (3/10).

Selain itu kepadatan harus cukup, artinya kota tersebut tidak boleh padat, menyebabkan sesak dan hanya menguras biaya transportasi.

"Kemudian estektika ini seperti dulu Bung Karno membangun Monas, ini diatur sedemikian rupa sehingga ada kebanggaan, dan nilai ini ingin saya jaga saja karena Presiden juga meminta langsung kepada saya," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian PUPR, sayembara gagasan desain kawasan IKN diselenggarakan mulai Kamis (3/10) hingga 18 Oktober 2019. Selama periode tersebut pihak-pihak yang berminat dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran.

Selanjutnya, pada 18 Oktober 2019 akan dilakukan tahapan pemberian penjelasan (*Aanwizjing*), 4 Oktober-29 November 2019 tahap penyusunan karya, 18—29 November 2019 pemasukan karya, 2—6 Desember evaluasi persyaratan administrasi.

Pada 9—11 Desember 2019 akan dimulai penjurian tahap I, 11—13 Desember 2019 penjurian tahap II, 16—20 Desember 2019 proses penetapan pemenang, 23 Desember 2019 penetapan dan pengumuman pemenang, 27 Desember 2019 pemberian hadiah.

Pada sayembara ini, pemerintah menawarkan hadiah sebesar Rp2 miliar untuk pemenang pertama, hadiah Rp1,25 miliar untuk pemenang kedua, dan Rp1 miliar untuk pemenang posisi ketiga. Adapun, untuk kategori harapan I dan harapan II masing-masing bakal mendapatkan Rp500 juta dan Rp250 juta. (*Fitri Sartina Dewi/k57*)